

MASA DEPAN NAMA DI INDONESIA

Dedi Sulaeman

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
dedi4548@uinsgd.ac.id

Dhisa Ayu Damayanti

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
dhisaayu.da@gmail.com

Muhamad Iqbal Al Hilal

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
iqbalalhilal23@gmail.com

ABSTRAK

Nama adalah sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, produk dan bahkan gagasan atau konsep, yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia diberi nama sebagai pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian di sebagian masyarakat di Indonesia ada kebiasaan untuk memanggil nama haji sebagai penghormatan kepada orang yang sudah ibadah haji. Kebiasaan seperti ini tentu saja akan berimbas pada samanya nama panggilan bagi orang yang sudah bergelar haji. Tidak sedikit bagi sebuah komunitas yang sudah haji dipanggil haji yang tentu saja membuat bingung orang tersebut karena beberapa orang dipanggil dengan sebutan yang sama. Lantas bagaimana bila suatu saat semua orang di Indonesia sudah bergelar haji. Apakah semua orang di Indonesia akan bernama haji? Artikel ini membahas mengenai masa depan nama Indonesia atas dasar sebagai bagian kebiasaan orang Indonesia memakai yang menyebut sebutan informal yang membiasa, mengikat dan menurun. Artikel ini disusun berdasarkan studi kepustakaan yang memadai. Dengan menggunakan metode meta-analisis penulis menganalisis serta menginterpretasi data-data yang ada dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya.

Kata kunci: Gelar; Haji; Indonesia; Islam

ABSTRACT

Name is a designation or label given to objects, people, places, products and even ideas or concepts, which are usually used to distinguish one another. As social beings, humans are given a name as a differentiator between one another. However, in some people in Indonesia there is a custom to call the name of the Hajj as a tribute to people who have performed the pilgrimage. Habits like this of course will have an impact on the same nickname for people who already have the title of Hajj. Not a few for a community that has already had the pilgrimage called Hajj which of course confuses the person because several people are called by the same name. So what if one day everyone in Indonesia has a Hajj title. Will everyone in Indonesia be named Haji? This article discusses the future of the Indonesian name on the basis that it is part of the Indonesian people's habit of using informal, binding and declining names. This article is prepared based on adequate literature study. By using the meta-analysis method, the writer analyzes and interprets the existing data and supports each other.

Keywords: Label; Hajj; Indonesia; Islam

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan hal vital yang menjadi bagian utama manusia sebagai makhluk sosial berkomunikasi. Bahkan, hewan dan tumbuhan pun memiliki bahasanya sendiri untuk melakukan komunikasi. Seiring berjalannya waktu, bahasa diciptakan dan dikembangkan melalui berbagai konsep, cara, dan alat. Hal itu tentu berkaitan erat dengan kesepakatan antar manusia yang dalam hal ini disebut masyarakat. Seperti yang dikatakan Darheni, bahwa bahasa merupakan suatu hal yang disepakati penggunaannya, yakni masyarakat itu sendiri (Darheni, 2009). Namun demikian, perbedaan perspektif maupun faktor lain yang melatarbelakangi seperti bahasa nenek moyang sampai letak geografis tentu akan berpengaruh juga terhadap kesepakatan bahasa antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Waktu ke waktu hal tersebut akan melahirkan berbagai perbedaan dan pengaruh-pengaruh lain terhadap konstruksi sosial maupun tradisi suatu masyarakat.

Sementara menurut Hapsari Bahasa sendiri muncul dari adanya campur baur masyarakat dengan masyarakat lainnya bercampur baur dengan menyesuaikan daerahnya tanpa saling menyinggung perbedaan yang ada di tengah lingkungannya yang lama kelamaan digunakan tanpa disadari melunturkan kebudayaan mereka sendiri dan membuat kebudayaan baru seperti penggunaan bahasa dan istilah yang kemudian digunakan dan dianggap sudah lumrah bagi masyarakat tersebut (Hapsari, 2019)

Sebagai bahasa yang cukup muda, bahasa Indonesia secara otomatis akan merasakan dampak yang lebih besar tentang perkembangan atas pengaruh-pengaruh bahasa yang datang ke Indonesia. Belum lagi menyoal perbedaan akulturasi budaya dan tradisi berbagai agama. Selanjutnya, pengaruh-pengaruh globalisasi pun semakin hari semakin memberikan dampak yang cukup besar. Bangsa Indonesia menjadi lebih kesulitan dengan berbagai bahasa asing yang masuk seiring berjalannya waktu.

Berdasarkan kondisi tersebut, bahasa berkembang dalam masyarakat dengan perbedaan-perbedaan yang lebih kecil seperti adanya kelas-kelas sosial masyarakat maupun gelar-gelar penamaan yang lahir seiring berkembangnya bahasa. Tradisi dan kebiasaan

masyarakat pun melahirkan hukum adat yang berlaku. Sebelumnya Yasa mengatakan bahwa secara hakiki, manusia pada awal dasarnya tidak dilahirkan dengan membawa status sosial mereka (Yasa, 2014). Berbeda dengan Wadi tentang suatu kebiasaan yang mengakar kuat dan berlaku pada suatu kelompok masyarakat, yakni hukum adat yang kemudian melahirkan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial secara bertingkat atau hirarki (Wadi, 2017). Perbedaan tersebut tentu merupakan sebuah tanda bahwa pada dasarnya manusia memang tidak lahir dengan status sosial tertentu namun ketika bicara tentang budaya dan kepercayaan, status sosial kemudian melahirkan stratifikasi sosial yang begitu mengakar kuat. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu nama atau gelar menjadi hal yang populer untuk disandangkan kepada seseorang, terutama dalam masyarakat. Gelar dalam hal ini menjadi begitu populer dengan stratifikasi sosial yang mendukung, lebih-lebih setelah adanya masa-masa penjajahan atau dalam hal ini disebut dampak-dampak poskolonial dari berbagai budaya yang mempengaruhi.

Bicara soal nama dan gelar, para peneliti tertarik untuk membedah lebih lanjut mengenai penggunaan nama dan gelar di Indonesia dalam perspektif poskolonialisme. Para peneliti merasa, hal tersebut perlu dikaji ulang. Dengan adanya dampak-dampak poskolonial dari berbagai pengaruh budaya, tentu hal ini bisa dikatakan cukup menarik untuk dikaji mengingat banyaknya gelar dan nama yang lahir atas dampak-dampak tersebut. Negara Indonesia menjadi negara yang terombang-ambing dalam urusan budaya dan bahasa, lebih dari itu adalah tentang krisis identitas, bahkan secara personal atau individu. Status *quo* yang terjadi dewasa ini ternyata justru menimbulkan pertanyaan terkait gelar yang disisipkan atau bahkan mengganti nama panggilan seseorang seperti panggilan kata "Haji" untuk seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji di agama Islam.

Panggilan "Bu Haji" dan "Pak Haji" menjadi begitu populer yang kemudian menjadikan syarat bagi setiap orang yang telah melaksanakan ibadah haji haruslah dipanggil "Bu Haji" maupun "Pak Haji". Berdasarkan hal tersebut, timbul suatu pertanyaan tentang

MASA DEPAN NAMA DI INDONESIA

bagaimana masa depan nama seseorang jika gelar "Haji" menjadi suatu kebiasaan yang melahirkan tradisi menerus di Indonesia, khususnya pada masa poskolonial saat gelar "Haji" mulai lahir di Indonesia. Pertanyaan tersebut merumuskan masalah tentang nama seseorang yang berpotensi tidak bermakna karena tergantikan begitu saja dengan gelar tersebut atau dengan kata lain "Bagaimana gelar "Haji" berdampak pada masa depan nama di Indonesia?"

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah pengkajian mengenai penggunaan nama atau gelar "haji" dan perkembangannya di masa mendatang dalam perspektif poskolonialisme. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka agar tersusun rapi. Seperti yang dikatakan Sari & Asmendri, studi kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dipergunakan pada proses pengumpulan data seperti buku, artikel dan lain sebagainya. Studi pustaka juga disebut sebagai *Library Research* (Sari & Asmendri, 2018). Para penulis menggunakan beberapa sumber baik dari buku maupun artikel ilmiah dan sumber lainnya yang tentunya penggunaan sumber untuk penulisan ini dilakukan secara hati-hati dan diseleksi terlebih dahulu (Dedi Sulaeman, O. Setiawan Djuharie, Abdul Hannan E. F, n.d.).

PEMBAHASAN

Indonesia adalah negara yang tercatat memiliki diversitas budaya tertinggi di dunia. Predikat ini memberikan problematika tersendiri ketika usaha serius pencarian identitas budaya nasional baru dimulai pada masa-masa kemerdekaan (Sukarwo, 2017). Tentu dengan mengkaji ulang sejarah Indonesia, hal yang Sukarwo maksud merupakan hal yang benar-benar terjadi di Indonesia. Diversitas budaya bahkan menjadi suatu problematika yang belum tuntas sampai hari ini. Meskipun sudah merdeka secara istilah, negara Indonesia masih belum pandai untuk menyelesaikan permasalahan fundamental seperti budaya, lebih-lebih era modern kekinian yang menjadikan seluruh komponen terombang-ambing tidak tahu arah. Penyelarasan budaya maupun komponen untuk menjadikan satu identitas yang nasional pun

belum memberikan hasil yang jelas dan signifikan sampai hari ini. Pembentukan identitas nasional di ranah kebudayaan masih dalam proses yang belum terlihat hasilnya.

Nurhadi berkata bahwa secara de facto, negara Indonesia sudah bisa dikatakan merdeka dari penjajahan. Meskipun begitu, ada berbagai aspek yang ternyata masih menunjukkan sebuah legitimasi atau pengukuhan dan mimikri atau peniruan yang berasal dari negara bekas penjajah dari Barat, yang mana hal inilah yang secara kritis mesti disadari dan diperhatikan (Nurhadi, 2013a). Pendapat tersebut tidak lain menjelaskan bahwa masa poskolonial di Indonesia menjadi catatan penting dalam sejarah bagaimana negara-negara bekas penjajah banyak mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan bangsa Indonesia. Mulai dari bahasa sampai kepada tatanan berkehidupan dan gaya hidup.

Belum lagi budaya Timur yang ikut seolah bersaing dengan budaya Barat di Indonesia melahirkan budaya-budaya dan gaya hidup bahkan serapan-serapan budaya yang belum tentu cocok. Alhasil, pemaksaan budaya akan menjadikan ilmu dan kemurnian budaya itu sendiri justru memudar bahkan berpotensi alih makna yang dewasa ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Alih makna pun menjadi cikal bakal penggunaan suatu gelar yang tidak sejalan dengan tujuan awal diberikannya gelar bahkan menyimpang jauh dari definisi awalnya. Hal tersebut tentu merupakan dampak dari akulturasi budaya yang ada.

Campur aduk budaya tidak hanya terjadi melalui teknologi dan media-media massa seperti kekinian. Hal-hal seperti bahan ajar dan pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi pun seringkali jadi sasaran penjajahan baru yang akan menambah simpang-siur budaya di Indonesia. Kepentingan-kepentingan oknum maupun individu kaum elit mulai bergelut di ranah budaya dan tradisi, akibatnya masyarakat menengah atau kecil benar-benar menjadi korban bahkan oleh bangsanya sendiri. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk memahami status quo yang terjadi menjadikan sebagian besar masyarakat hanya *ikut-ikutan* yang kemudian menjadi masyarakat yang begitu mudah diperdaya dan dipengaruhi, salah satunya tentang pemberian nama dan gelar.

Berbeda dengan gelar, nama merupakan suatu tanda yang diberikan terhadap segala sesuatu seperti manusia, hewan, tumbuhan, jalan dan lain sebagainya. Nama orang Indonesia memiliki karakteristik yang bervariasi selaras dengan bervariasinya sejarah dan budaya suku bangsa di Indonesia. Begitu pula pendapat Kurniawati & Mulyani yang menyatakan bahwa karakteristik nama orang Indonesia itu beragam dan bervariasi seiring dengan sejarah budaya Indonesia itu sendiri. Banyak aspek yang mempengaruhi nama orang Indonesia, seperti sifat, jenis, sampai jumlah kata menjadi cara tersendiri untuk menuliskan nama bahkan cara menulisnya pun demikian. (Kurniawati & Mulyani, 2012). Pemberian nama sudah lazim kita temui di manapun yang kemudian diberikan dengan tujuan tertentu pada umumnya, sedangkan gelar merupakan sebuah sebutan kehormatan maupun kebangsawanan. Gelar seperti halnya nama yang memiliki banyak pengaruh dalam penerapannya, apalagi pada masa-masa poskolonial.

Pada tahun 2013, Ashcroft dkk. menyatakan, *“Post-colonialism (or often postcolonialism) deals with the effects of colonization on cultures and societies”*, (Ashcroft et al., 2013). Berdasarkan hal tersebut, artinya poskolonialisme sangat berkaitan erat dengan dampak-dampak kolonialisme pada budaya dan masyarakat. Sementara menurut Nurhadi, poskolonial merupakan kajian terhadap karya-karya sastra (dan bidang yang lain) yang berkaitan dengan praktik kolonialisme atau imperialisme baik secara sinkronik maupun diakronik (Nurhadi, 2013b). Keduanya berpendapat bahwa poskolonialisme adalah sebuah kajian sekaligus masa yang berkaitan dengan penjajahan atau kolonialisme. Hal tersebut tentu menyebabkan dampak-dampak yang berperan besar terhadap budaya dan masyarakat.

Pada awalnya boleh jadi tujuan diadakannya gelar untuk nama seseorang di Indonesia adalah salah satu bentuk kehormatan atau hal lainnya, namun seiring berjalannya waktu bisa saja hal tersebut justru menjadi ajang penyalahgunaan jabatan, gelar, dan sejenisnya untuk kemudian merasa berhak melakukan apapun dengan gelar yang disandang atau diberikan kepada yang bersangkutan. Nama-nama di Indonesia banyak

ditambah dengan gelar-gelar lain seperti marga, kehormatan, adat, kebangsawanan, sampai pada gelar “Haji” bagi seseorang yang telah menyelesaikan ibadah haji dalam agama Islam. Gelar “haji” menjadi sebutan yang sudah sangat tidak lazim terdengar. Bahkan plesetan-plesetan para pedagang kepada pembeli pun lumrah memberikan sebutan “Pak Haji” dan “Bu Haji” kepada para pembeli dengan konotasi pembeli tersebut adalah orang yang dihormati, seorang “haji”. Gelar “haji” lazim juga disematkan sebelum nama seseorang. Misalnya nama Dedi Sulaeman menjadi H. Dedi Sulaeman (Haji Dedi Sulaeman) dikarenakan Haji Dedi Sulaeman telah melaksanakan ibadah haji. Hal tersebut menjadikan pengertian baru bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah haji bagi umat muslim akan otomatis menyematkan kata “haji” di depan namanya. Aturan semacam ini nampaknya tidak diwajibkan dalam Islam itu sendiri, namun sebagai masyarakat Indonesia, nampaknya hal ini sudah menjadi kewajiban.

Sementara kewajiban/rukun di dalam agama Islam sejatinya terumus dalam Lima Rukun Islam, yakni Islam itu didirikan atas Lima Pilar: 1) Kesaksian bahwa tiada Tuhan (Yang Haq disembah) kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah; 2) Mendirilmn shalat; 3) Mengeluarkan zakat; 4) Puasapada bulan Ramadhan; 5) Mengerjakan haji ke Baitullah (Aziz, 2001). Hal itu selaras dengan Departemen Agama Republik Indonesia menetapkan bahwa ibadah haji adalah proses seorang manusia untuk mencapaimanusia sejati sebagai pelampiasan potensi yang diberikan Allahkepadanya, yaitu potensi sebagai hamba di hadapan Allah. Haji diwajibkan kepada yang mampu berdasarkan Al-Qur’an ayat 97 surat (3) Ali ‘Imran yang artinya: “... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya...” (Departemen Agama RI, 2007). Maka dari itu, selain sebagai bentuk penghambaan diri terhadap Allah, ibadah haji pun hanya diperuntukkan bagi orang yang sanggup atau mampu melaksanakannya. Seperti pendapat Zainuddin yang mengatakan, ibadah haji merupakan ibadah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang mampu, yang dalam bahasa agama disebut *istitha’ah*

(Zainuddin, 2013). Hal itu selaras dengan Saptono yang mengartikan “Haji” adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dijalankan oleh kaum muslimin bila sudah mampu melaksanakannya (Saptono, 2018a). Artinya, dari kelima rukun Islam yang wajib, ibadah haji adalah satu-satunya ibadah yang dilaksanakan ketika sudah mampu. Mampu yang dimaksud adalah mampu secara batin, fisik, dan finansial.

Gelar haji sendiri di setiap daerah di Indonesia memiliki makna masing – masing berbagai cara dilakukan untuk menghormati orang yang memiliki haji seperti adanya penghormatan nabi yang akan ataupun sudah berhaji, gelar ini pun statusnya lebih penting bagi masyarakat daerah tertentu seperti di Gorontalo yang beranggapan haji sebagai persiapan kematian dimana segalanya akan dipersiapkan dengan matang jika kelak selama ibadah haji meninggal keluarga yang ditinggalkan justru akan merasakan sukacita.

Panggabean kemudian mengembangkan haji sebagai penerapan 2 potensi manusia yang dapat dikategorikan bahwa ibadah ini sebagai aktualisasi diri dalam habl min Allah dan habl min an-naas. Hal tersebut menggambarkan perilaku manusia dalam percobaan untuk mengadakan (*to be being*) dirinya di hadapan Allah dengan memenuhi panggilan-Nya ke tanah suci karena ia (mungkin) telah meng-ada sebagai manusia di atas bumi. Dengan demikian ia akan mencapai otentitas dan kesempurnaan diri sebagai manusia (*Fully Function Person*) (Panggabean, 2019). Potensi manusia tersebut menjadikan pengaruh penggunaan gelar “haji” untuk disandangkan sebagai bentuk penghormatannya kepada orang yang telah melaksanakan ibadah tersebut. Kesempurnaan diri sebagai manusia menjadikan tumpuan seseorang untuk meninggikan derajat diri ketika telah mampu melaksanakannya. Hal itu menjadikan narsisme seseorang meningkat, akibatnya gelar “haji” semakin populer, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, keistimewaan yang lahir dalam pelaksanaan ibadah haji menjadi salah satu faktor pemberian gelar “haji” untuk setiap orang yang telah selesai melaksanakannya. Tentu berdasarkan keistimewaan tersebut, penyalahgunaan gelar akan dijadikan ajang beradu kepentingan para penguasa.

Saptono merunutkan bahwa dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah, gelar haji tidak dipakai. Gelar haji tidak dijumpai atau dipakai bahkan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Meski mereka pernah melaksanakan ibadah haji, para sahabat tidak bergelar haji maupun mempunyai sebutan haji sebelum namanya, seperti Abu Bakar yang tidak pernah terdengar disebut sebagai Haji Abu Bakar, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Selain itu, imam-imam besar ahli hadits seperti Imam Bukhari, Muslim, Attirmidzi, Abu Dawud, dan sebagainya tidak pernah disebut dengan Haji Imam Bukhari dan seterusnya. Meskipun dapat dipastikan bahwa beliau-beliau tersebut sudah melaksanakan ibadah haji bahkan tidak hanya sekali dalam hayatnya (Saptono, 2018b). Maka dari itu, gelar “haji” sebenarnya tidak dipakai bahkan sejak masuknya Islam ke Indonesia atau keberadaan agama Islam dalam runtutan sejarahnya. Hal-hal yang menyebabkan gelar “haji” di Indonesia tidak lain adalah sebuah tanda kehormatan dan sisanya adalah pengaruh budaya yang simpang siur. Meskipun begitu, jika ditelaah lebih jauh, gelar “haji” ternyata baru terdengar berdasarkan sejarah lampau bangsa Indonesia pada masa kesultanan. Sultan Pangeran Ratu pada tahun 1596-1647 yang menggunakan kata “haji” atau gelar “haji” sebagai tanda kehormatan. Selain itu, “haji” juga pernah dipakai untuk menyebut nama daerah yang dijadikan tanah perdikan. Selain itu, di daerah Jawa istilah “haji” justru berkaitan dengan sesuatu yang dihormati, yakni sebuah objek seperti tempat, wilayah, bahkan aktivitas yang dihormati. Berdasarkan hal tersebut, tentu gelar “haji” yang dijumpai hari ini dengan gelar “haji” yang dipakai dahulu sangat berbeda. Keberagaman penggunaan gelar “haji” masih belum jelas hingga saat ini karena kekinian, gelar “haji” merupakan gelar yang diperuntukkan bagi orang Islam yang mampu dan sudah melaksanakan ibadah “haji”. Gelar tersebut tidak lain hanyalah sebuah “sebutan”. Meskipun begitu, tetap saja gelar “haji” masih menjadi gelar yang konotasinya tinggi untuk seseorang yang menyandang gelar tersebut. Perbedaan perilaku dan cara diperlakukan terhadap orang bergelar “haji” dan “non-haji” masih begitu terlihat jelas.

Hal-hal tersebut jelas membuktikan bagaimana gelar “haji” begitu fundamental

mempengaruhi komponen masyarakat dan budaya. Gelar menjadi modal sekaligus alat politik bagi para muslim elit. Tujuan murni penghormatan yang mulia lambat laun menjadi tujuan kotor yang serakah. Selain itu, fungsi nama pun kian menipis bobot kualitasnya dibanding gelar yang diperoleh. Nama menjadi cenderung tidak penting dibandingkan dengan gelar apa yang disandangnya.

Pada abad ke-19 masyarakat yang berangkat haji mulai mengalami peningkatan diakibatkan mulai adanya kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya agama yang mendorong peningkattan banyaknya yang berangkat haji kala itu yang dimana pada awalnya keinginan untuk berhaji hanya sebatas dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam semata (Istikomah, 2017). Hal tersebutlah yang mendorong masyarakat Indonesia memiliki pemikiran tentang betapa semua orang harus memiliki goals yang sama dalam hidupnya sebagai seorang haji. Apalagi di Indonesia gelar menjadi suatu kehormatan yang akan sangat memenuhi hasrat manusia untuk disanjung dan dihormati.

Pada tahun 2020, jemaah haji Indonesia mencapai lebih dari 230 ribu orang dari jumlah penduduk di tahun 2020 sebanyak 270 juta orang. Hal tersebut menggambarkan peningkatan setiap tahunnya dibandingkan tahun tahun sebelumnya seperti tahun 2011 hanya sebanyak 100 ribu jemaah. Berdasarkan peningkatan tersebut, dapat dipastikan bahwa masa mendatang, jemaah haji yang namanya otomatis akan disebut “haji” atau diberi gelar “haji” akan semakin banyak. Ditambah, kepentingan-kepentingan elit muslim yang sengaja menunaikan ibadah haji karena gelarnya sangat berpengaruh terutama di bidang politik. Tentu berdasarkan alih tujuan tersebut dampak pemberian gelar semakin jauh dari tujuan awal diberikannya gelar tersebut.

Selain itu, seiring dengan perkembangan zaman tidak dapat dipungkiri adanya teknologi yang semakin mempermudah para calon haji dalam pelaksanaan ibadah haji seperti adanya alat komunikasi seperti telepon seluler, alat bantu dengarm, panduan doa dan sebagainya. Akan tetapi, penggunaan teknologi ini seringkali disalahgunakan juga oleh oknum tidak bertanggungjawab dan tidak terpuji dengan mengambil foto saat beribadah dan

pembohongan publik dengan aplikasi edit foto yang sepiintas sedang beribadah ditanah suci dengan tujuannya sebagai ajang pameran dan upaya peningkatan sosial di lingkungannya (Dharma Kelana Putra, 2017).

Perubahan makna suatu nama baik untuk penyebutan status sosial maupun untuk penggunaan lainnya juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi yang sangat kuat pada saat ini. Peran globalisasi memiliki ruang tersendiri yang bisa merubah tatanan masyarakat termasuk di Indonesia. Pengaruhnya juga akan dirasakan termasuk kepada masa depan nama yang sudah sangat familiar pada saat ini fungsi dan tingkatan sosialnya, hal ini didasarkan kepada adanya pengaruh globalisasi yang ditancapkan secara perlahan dan bergeser menjadi entitas atau nama dari kebudayaan yang baru. Proses hadirnya globalisasi tidak jarang dimaknai oleh masyarakat sebagai sebuah ketakutan yang perlu dihindari namun, pada realitanya dalam menghadapi arus tersebut diperlukan keberanian yang kuat dan bisa menyaring segala yang masuk dengan Tindakan-tindakan yang bersifat *defensif* (Azet, n.d.).

Jika melihat dalam sejarahnya bahasa Indonesia juga dihasilkan dari keputusan yang sangat krusial. Perbedaan etnis, bahasa dan suku merupakan pengikat yang menyatukan perbedaan dalam bingkai identitas bangsa yang sudah dirumuskan oleh para tokoh pendiri bangsa yang ingin tetap menyatu meskipun terdapat banyak perbedaan. Meski bagaimanapun sebagai negara berkembang Indonesia masih belum berada di tahap satu tujuan dalam perbedaan. Penggunaan gelar dalam hal ini menjadi salah satu contoh keadaan yang masih diperbincangkan terkait tujuan awal pemberian gelar itu sendiri.

Maka demikian, perubahan arti nama di Indonesia selain dari adanya kasta sosial, maraknya globalisasi juga dipengaruhi kebiasaan dan budaya setempat terlepas dari perbedaan semata. Sejalan dengan itu, Ngurah dan Putrayasa mengatakan, Perubahan arti nama yang terjadi pada saat ini bisa dikatakan sebagai suatu hal yang lumrah terjadi di tengah masyarakat (Ngurah & Putrayasa, n.d.).

SIMPULAN

Pengaruh poskolonialisme menjadikan masyarakat Indonesia cenderung menyalahgunakan gelar dan melakukan apa saja untuk mendapatkan gelar tersebut, sehingga semakin hari seseorang yang bergelar “haji” semakin banyak. Hal itu menjadi pertanyaan besar ketika sebagian besar nama orang di Indonesia akan dipanggil dengan sebutan yang sama, yaitu “haji”. Lebih dari itu, gelar “haji” pada saat ini bukan hanya diberikan untuk orang sudah berangkat ibadah haji semata. Gelar “haji” juga dapat kita jumpai pada siapapun yang belum tentu menunaikan ibadah haji.

Para pedagang di pasar sebagai contoh kekinian ini banyak memanggil para pembelinya dengan sebutan “Pak Haji” ataupun “Bu Haji” tanpa tahu jelas latar belakang pembeli bahkan nama asli pembeli. Artinya, gelar “haji” bukan hanya sebatas nama namun juga memiliki kaitan dengan status sosial seseorang di masyarakat. Konotasi penyebutan gelar “haji” ini pun berperan besar mempengaruhi strata sosial. Pelayanan yang diberikan juga akan cenderung berbeda ketika pedagang tahu latar belakang pembeli, lebih ketika pembelinya adalah seorang “haji” atau seorang yang telah melaksanakan haji. Pelayanan yang diberikan pun cenderung lebih sopan, baik, dan ramah dibandingkan dengan pembeli berlatarbelakang “non-haji”. Hal tersebut pun tidak hanya terjadi di ranah jual-beli, di ranah lain seperti politik, pendidikan, dan ekonomi pun demikian. Maka dari itu, masa depan nama akan semakin tidak berarti sementara gelar akan semakin menjadi acuan utama masyarakat menilai.

Kehadiran globalisasi yang semakin masif juga turun mempunyai andil yang sangat penting dalam proses perubahan arti suatu nama baik dari mulai makna yang terkandung, pengguna dan fungsi dari nama tersebut. Hadirnya upaya perubahan penggunaan nama di masyarakat juga merupakan dampak negatif dari adanya globalisasi yang dikhawatirkan akan menjadikan nama yang sudah ada berubah bahkan hilang diakibatkan oleh adanya arus kebebasan seperti sekarang ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashcroft, B., Griffiths, G., & Tiffin, H. (2013). Post-colonial studies: The key concepts. *Post-Colonial Studies: The Key Concepts*, 1–355. <https://doi.org/10.4324/978023777855>
- Azet, G. J. (n.d.). *Keeksistensian Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional dan Ilmu Pengetahuan pada Era Globalisasi*.
- Aziz, S. A. (2001). *HAJI, UMROH, DAN ZIARAH Menurut Kitab dan Sunnah*. Departemen Urusan Ke-Islaman, Wakaf, Da'wah dan Bimbingan Islam Kerajaan Saudi Arabia.
- Darheni, N. (2009). Penyerapan Leksikon Asing Dalam Bidang Otomotif Ke Dalam Bahasa Indonesia: Tinjauan Secara Morfologis Dan Fonologis. *Jurnal Sosioteknologi*, 8(17), 646–666.
- Dedi Sulaeman, O. Setiawan Djuharie, Abdul Hannan E. F, U. P. (n.d.). *Bunyi Glotal Hambat Suara dalam Bahasa Sunda, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris*. 3.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul'ali*.
- Dharma Kelana Putra. (2017). Haji Dulu Haji Sekarang: Dinamika Haji dan Problematikanya dalam Konteks Kekinian. *Buletin Haba*, 82, 1–11.
- Hapsari, D. (2019). *BAHASA SEBAGAI WUJUD AKULTURASI DALAM*. 7(1), 336–347.
- Istikomah, I. (2017). Pelaksanaan Ibadah Haji Abad Ke 19 Dan Dampaknya Terhadap Perlawanan Rakyat Kepada Kolonialisme Belanda. *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v5i2.2105>
- Kurniawati, R. D., & Mulyani, S. (2012). DAFTAR NAMA MARGA/FAM, GELAR ADAT DAN GELAR KEBANGSAWANAN DI INDONESIA. In Ahmad Masykuri (Ed.), *PERPUSTAKAAN NASIONAL RI*. Perpustakaan Nasional RI. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Ngurah, G., & Putrayasa, K. (n.d.). *SEJARAH BAHASA INDONESIA UNIVERSITAS UDAYANA FAKULTAS ILMU BUDAYA PROGRAM STUDI SASRA INDONESIA 2018*.

- Nurhadi, N. (2013a). Bentuk-Bentuk Poskolonialitas Di Indonesia Mutakhir Pada Majalah Tempo. *Litera*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/ltr.v10i1.1169>
- Nurhadi, N. (2013b). Bentuk-Bentuk Poskolonialitas Di Indonesia Mutakhir Pada Majalah Tempo. *Litera*, 10(1). <https://doi.org/10.21831/ltr.v10i1.1169>
- Panggabean, S. R. (2019). *Haji Dalam Refleksi. February*, 0–6. <https://doi.org/10.31227/osf.io/f6ktq>
- Saptono, N. (2018a). Latar Belakang Pemakaian Gelar “Haji .” *Panalungtik*, 1(2), 73–80. <https://doi.org/10.24164/pnk.v1i2.13>
- SSaptono, N. (2018b). Latar Belakang Pemakaian Gelar “Haji .” *Panalungtik*, 1(2), 73–80. <https://doi.org/10.24164/pnk.v1i2.13>
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1), 15.
- Sukarwo, W. (2017). Krisis Identitas Budaya: Studi Poskolonial pada Produk Desain Kontemporer. *Jurnal Desain*, 4(03), 311. <https://doi.org/10.30998/jurnaldesain.v4i03.1869>
- Wadi, L. T. (2017). Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsaan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9(01), 106–133. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v9i01.1156>
- Yasa, I. N. (2014). Orientalisme, Perbudakan, Dan Resistensi Pribumi Terhadap Kolonial Dalam Novel-Novel Terbitan Balai Pustaka. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 249–256. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v2i2.2179>
- Zainuddin, M. (2013). HAJI DAN STATUS SOSIAL: Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim. *EL-HARAKAH (TERAKREDITASI)*, 15(2), 169.